

KORAN
DIGITAL

radar.

EDISI JUMAT
22 SEP 2023

MEDIA

T E R D E P A N



PROYEK TOL & BANDARA IKN BAKAL TARIK INVESTOR



**PEMKAB KUTIM TARGETKAN HAKI
PISANG KEPOK GRECEK DI 2024**



RADALOK TRIWULAN III 2023, ARDIANSYAH TEKANKAN FOKUS SERAPAN ANGGARAN

SANGATTA - Pemkab Kutim meminta kepada seluruh perangkat daerah (PD) tetap bekerja dalam program "on the track". Hal ini ditegaskan langsung Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat membuka gelaran Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Kutim dalam Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) Triwulan III 2023 di Crystal Ballroom Hotel Mercure, Kamis (21/9/2023).

Turut hadir dalam Radalok, Wabup Kasmidi Bulang, Sekretaris Daerah Rizali Hadi, Asisten Ekonomi Pembangunan Zubair dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Insan Bowo Asmoro. Kegiatan Radalok Triwulan III ini turut diikuti kepala PD dan Camat se-Kutim.

Radalok ini sendiri bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan serapan anggaran yang tel-

ah berjalan di Triwulan III Tahun 2023. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah berjalan dari setiap OPD baik terkait pembangunan maupun realisasi keuangan.

Dalam arahannya, Bupati Ardiansyah mengingatkan seluruh jajarannya untuk tetap fokus dan semangat bekerja di sisa waktu dekat ini.

"Bekerjalah sesuai dengan prosedur dan standar yang benar dan tetap fokus. Lakukan koordinasi dengan baik jika ada kendala di lapangan sehingga semua kegiatan bisa terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan," ujar Ardiansyah.

Dia menambahkan, PR (pekerjaan rumah) kita masih banyak. Dengan anggaran yang mengalami kenaikan cukup signifikan ini tentu berimplikasi terhadap peningkatan dan pem-

erataan pembangunan.

"Semoga dengan kenaikan anggaran, kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Tidak ada lagi alasan pegawai tidak bersemangat bekerja karena semua hak sudah terpenuhi," tegasnya.

Sementara itu, Wabup Kutim Kasmidi Bulang menyebutkan bahwa kinerja OPD harus lebih dipacu lagi mengingat sudah masuk Triwulan III. Capaian realisasi baik fisik maupun keuangan rata-rata 37 persen.

"Sewajarnya harus di atas 50 persen. Untuk itu kinerja OPD harus dipacu dan lebih semangat. Tim TPAD dan Banggar harus lebih optimal lagi, karena semua sudah ada mekanismenya. Saya optimis dengan semangat kerja keras, koordinasi yang baik target serapan bisa tercapai," singkatnya.

Pewarta : Irfan Aditam
Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai. ANTARA/HO - OIKN

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL SUSUN SISTEM INFORMASI SPASIAL PENATAAN IKN

JAKARTA - Badan Informasi Geospasial (BIG), sebagai lembaga pemerintah non kementerian, menyusun basis data serta sistem informasi geospasial dalam penataan daerah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Info geospasial ini penting karena ketika kita membuka suatu kawasan dan merencanakan suatu wilayah, maka kita harus punya rencana detail tata ruang yang dibangun di atas peta dasar," ujar Kepala BIG Muh Aris Marfai dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Aris berharap setelah adanya sistem informasi geospasial dalam penataan daerah IKN ini, IKN dapat dibangun menjadi kota yang mampu menciptakan kehidupan yang harmonis antara masyarakat dengan alam, serta jelas delineasinya.

Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Data dan Informasi Geospasial untuk Mendukung Pembangunan Wilayah Ibu Kota Nusantara.

Perjanjian ini bertujuan untuk mengesahkan pelaksanaan kebijakan nasional yang mengacu pada data spasial yang akurat serta terkait pelaksanaan kebijakan one map one policy, yaitu batas wilayah, kehutanan, perencanaan ruang, sarana dan prasarana, perizinan dan pertahanan, sumber daya alam dan lingkungan, serta kawasan khusus di wilayah IKN.

Aris mengatakan, sebelumnya BIG sudah melaksanakan pemetaan skala besar untuk menentukan lokasi IKN dan membuat peta dengan skala 1:5000.

"Sehingga, dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman ini, dibuat peta dengan skala yang lebih detail untuk memudahkan perencanaan tematik di IKN," katanya.

Sementara itu, Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan bahwa dengan pemetaan yang lebih presisi, Nusantara dapat hadir untuk membuat kota yang memiliki ciri yang belum pernah ada di Indonesia, yaitu kota hutan yang berkelanjutan.

"Kita sudah masuk era urbanisasi di mana kota mendapatkan tekanan yang tinggi karena banyaknya pendatang yang masuk. Jadi, kita perlu mengelola kota dengan tata ruang yang sebaik-baiknya," kata Bambang.

(Ant/MK)

Pewarta : Suharsana Aji
Editor : Adi Lazuardi



Pemkab Kutim Targetkan HAKI Pisang Kepok Grecek di 2024

SANGKULIRANG - Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman mengatakan saat ini pihaknya tengah meyakinkan publik, bahwa pisang kepok grecek akan mendapatkan hak kekayaan intelektual (HAKI). Oleh karena itu pisang kepok grecek terus dikembangkan dengan didampingi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kaltim.

"Tahun depan ada dua yang kita ajukan (mendapatkan HAKI). Yakin nanas madu dan pisang kepok grecek ini. Mudah-mudahan pisang kepok bisa dapat (HAKI), mengingat sudah banyak pula permintaan pisang kepok dari luar daerah," kata Ardiansyah usai memberikan arahan di Bimtek dan Sertifikasi Benih Pisang dan Teknologi Budidaya Tanaman Pisang bagi petani di Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Selasa (19/9/2023).

Ia menjelaskan pisang kepok grecek ini adalah pisang asal

Kaltim. Asal namanya pisang saba di bahasa Indonesiakan menjadi pisang kepok. Ditambahkan bahasa Kutai lagi grecek. Jadilah pisang kepok grecek namanya.

Kendati demikian, Ardiansyah mengutarakan pisang ini telah mendapatkan hati di berbagai negara. Di antaranya Amerika, Malaysia, Singapura, Hongkong. Sementara di dalam negeri di Sumatera Utara serta daerah lainnya.

"InsyaAllah, kita berdaulat di bidang ketahanan pangan, sehingga menciptakan peluang menyejahterakan rakyat," ucap orang nomor satu di Pemkab Kutim itu didampingi Kepala DT-PHP Kutim Dyah Ratnaningrum dan para PPL Sangkulirang.

Ardiansyah menjelaskan alasan mengapa harus memperoleh HAKI? Karena sudah banyak daerah lain mengambil bibit pisang kepok grecek ini. Untuk itu harus menjadi perhatian khusus oleh Pemkab Kutim

dengan memperoleh HAKI di tahun depan. Kemudian produk-produk harus ditingkatkan dengan menciptakan turunannya pisang kepok grecek.

"Selanjutnya perluasan areal tanam pisang kepok grecek yang diberikan pemerintah untuk para petani. Meskipun sudah tertanam seluas 5.800 Hektare di Kutim, tapi tak boleh berhenti di situ," tegasnya.

Ardiansyah mengungkapkan selain pisang kepok grecek di wilayah ini juga tengah dikembangkan pisang cavendish. Karena pisang cavendish ini merupakan salah satu peluang besar yang masuk dalam pasar dunia.

"Saya minta petani terus semangat, karena ada beberapa negara senang dengan pisang kepok. Apalagi pisang cavendish yang sudah mendunia sejak dahulu. Ini potensi yang luar biasa," tutupnya.

Pewarta : Irfan Aditama
Editor : Nicha Ratnasari



Presiden Jokowi memberikan sambutan saat "groundbreaking" Hotel Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (21/9/2023). (ANTARA/Indra Arief)

PROYEK TOL DAN BANDARA IKN RAMPUNG DIYAKINI MAMPU TARIK INVESTOR

PENAJAM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini jika pembangunan tol Balikpapan-Nusantara dan bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) selesai, maka investor akan semakin berbondong-bondong menanamkan modalnya di ibu kota baru tersebut.

"Dua (tol dan bandara) ini menjadi kunci kalau ini selesai, saya meyakini, ini belum selesai sudah berbondong-bondong, apalagi dua ini selesai akan lebih berbondong-bondong lagi investor yang akan menanamkan modalnya di IKN," kata Presiden Jokowi saat "groundbreaking" Hotel Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis.

Jokowi menjelaskan pembangunan tol Balikpapan-Nusantara akan segera memasuki fase konstruksi. Ia menargetkan pembangunan tol tersebut selesai pada Juli 2024. Tol Balikpapan-Nusantara akan memangkas waktu tempuh

menjadi 30 menit dari Balikpapan ke Nusantara, dibanding saat ini yang sekitar 1,5-2 jam.

"Tadi Menteri PUPR sampaikan ke saya sudah tembus, artinya akan segera masuk ke konstruksinya. Akan selesai kapan? Juli 2024 akan selesai jalannya," kata dia.

Sedangkan untuk bandara, kata Jokowi, pembangunannya akan segera dimulai. Menurut Jokowi, waktu tempuh bandara dan pusat kota Nusantara hanya 15 menit.

"Kira-kira 15 menit dari bandara menuju ke sini, dan kita harapkan di Juli, maksimal awal Agustus itu sudah bisa diselesaikan," kata Jokowi. Presiden mengatakan beberapa waktu lalu telah datang sebanyak 30 investor dari Korea Selatan, 40 investor dari Jepang, dan 120 investor dari Singapura yang menunjukkan minatnya ke IKN. Jokowi meyakini para investor tersebut sudah melakukan kalkulasi dan perhitungan

yang cermat tentang potensi ekonomi dari IKN.

IKN dibangun secara jangka panjang dengan proyeksi penyelesaian secara keseluruhan pada 2045. Pemerintah membangun IKN dengan komposisi pendanaan yang sebagian besar berasal dari kerja sama dan investasi swasta, sedangkan pendanaan dari APBN dialokasikan hanya sebesar 20 persen dari total kebutuhan pendanaan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi anggaran IKN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 hingga 2024 adalah Rp75,5 triliun. Secara rinci, nilai realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp5,5 triliun.

Kemudian, alokasi pada APBN 2023 sebesar Rp29,4 triliun dan alokasi pada Rancangan APBN (RAPBN) 2024 adalah Rp40,6 triliun. **(Ant/MK)**

Pewarta : Indra Arief Pribadi
Editor : Faisal Yunianto



PRESIDEN MEMULAI PENGISIAN BENDUNGAN SEPAKU SEMOI



**SASAR PEMILIH PEMULA GEN Z, KPU
PPU RUTIN MASUK SEKOLAHAN**



ANTARA/HO-Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo memutar tuas untuk memulai pengisian Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (21/9/2023).

PRESIDEN MEMULAI PENGISIAN BENDUNGAN SEPAKU SEMOI

PENAJAM - Presiden Joko Widodo memutar tuas untuk memulai pengisian air Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (21/9/2023).

Menurut keterangan pers dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden di Jakarta, Presiden memutar tuas yang berfungsi untuk membendung air di Bendungan Sepaku Semoi didampingi oleh sejumlah pejabat.

Pejabat yang mendampingi Presiden antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono,

Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Gubernur Kalimantan Utara Isran Noor.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bob Arthur Lombogia dalam laporannya menyampaikan bahwa pembangunan konstruksi Bendungan Sepaku Semoi sudah 97 persen rampung.

"Bendungan ini sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pengisian awal, sehingga Pak Presiden datang ke sini untuk

melakukan pengisian awal Bendungan Sepaku Semoi," katanya.

Bendungan Sepaku Semoi di Kecamatan Sepaku akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sekitarnya.

Selain itu, Bendungan Sepaku Semoi akan difungsikan sebagai sarana pengendali banjir.

"Di daerah hilir ada kadangkadangkang terjadi banjir sehingga bendungan ini nantinya akan berfungsi selain untuk (memenuhi kebutuhan) air baku juga akan berfungsi untuk pengendalian banjir," kata Bob. (Ant/MK)

Pewarta : Andi Firdaus
Editor : Maryati



ANTARA/Rangga Pandu

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan Hotel Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (21/9/2023).

JOKOWI : INVESTOR LOKAL DI IKN JADI LOKOMOTIF PEMICU INVESTOR LAIN

PENAJAM - Presiden Joko Widodo mengatakan keberadaan investor lokal di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi lokomotif yang akan memicu munculnya investasi-investasi besar lain di kawasan itu.

"Inilah yang nanti akan membawa, lokomotif pada hari ini, akan membawa gerbong di belakangnya, akan banyak (investasi) masuk ke Nusantara. Saya yakin itu," kata Jokowi dalam peletakan batu pertama Hotel Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (21/9/2023).

Dia menyampaikan beberapa bulan lalu sejumlah investor antara lain 30 investor dari Korea, 40 dari Jepang, dan 120 dari Singapura, telah datang meninjau IKN.

Menurut Jokowi kedatangan para investor itu jauh-jauh dari negara asalnya pasti sudah melalui kalkulasi matang.

"Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang.

Setelah datang langsung menemui saya. Artinya apa, tertarik," ucap dia.

Meskipun demikian Jokowi menegaskan dirinya memprioritaskan terlebih dahulu investor dari dalam negeri.

"Investor di dalam negeri harus didahulukan, kalau ndak pasti nanti saya dikomplain. 'Pak di dalam negeri ini yang punya duit banyak pak, ngapain cari ke Singapura, ke Malaysia, ke Korea, ke Jepang, ke Uni Emirat Arab, di sini banyak yang punya duit pak', pasti ada yang berbicara seperti itu," tuturnya.

Jokowi menekankan bahwa pemerintah sudah menawarkan investasi berulang kali ke pengusaha lokal saat melakukan tes pasar.

Dia pun berterima kasih karena saat ini sudah ada investor dalam negeri yang akan membangun Hotel Nusantara.

Jokowi mengatakan kehadiran investor lokal di IKN adalah bukti

bahwa IKN sangat menjanjikan.

"Nggak mungkin beliau-beliau ini mau mulai dengan Rp20 triliun kalau ndak ada cuan-nya. Dipikir beliau-beliau ini adalah lembaga sosial? Bukan. Datang menanamkan modalnya pasti akan mencari keuntungan sebesar-besarnya dan itu wajar," ujarnya.

Jokowi mengatakan kehadiran investor lokal juga memberikan kenyamanan dan keyakinan serta rasa percaya diri bahwa Ibu Kota Nusantara sangat diminati oleh investor.

Pada kesempatan itu pun Presiden meresmikan ground breaking pembangunan Hotel Nusantara di IKN.

"Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini ground breaking Hotel Nusantara bintang 5 secara resmi dimulai," kata dia. (Ant/MK)

Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga

Editor : Chandra Hamdani Noor



PRESIDEN JOKOWI: INVESTASI SWASTA KUNCI BANGUN IKN

PENAJAM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan investasi swasta dalam penyediaan beragam kebutuhan fasilitas publik menjadi kunci proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Saya kira investasi para pengusaha untuk Ibu Kota Nusantara sangat menentukan dan menjadi kunci," kata Presiden Jokowi usai peletakan batu pertama Hotel Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, diikuti melalui video tayangan langsung Sekretariat Presiden di Jakarta.

Presiden Jokowi mengatakan investor swasta mulai berdatangan ke IKN seiring penyelesaian pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan tol, serta Bandara yang ditarget rampung di tahun ini.

"Swasta kan sudah mulai masuk, artinya di sini ada sesuatu dan kalau sudah ada sesuatu akan terus berbondong-bondong berdatangan, dan yang paling penting kecepatan penyelesaian untuk urusan infrastruktur dasar," katanya.

Selain rangsangan penyediaan infrastruktur dasar, kata Jokowi, pemerintah juga memfasilitasi insentif Super Tax Deduction, yakni insentif berupa pengurangan pajak bagi pelaku usaha dan pelaku industri yang melakukan kegiatan pengembangan di IKN.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak berupa tax holiday untuk merangsang minat investor asing.

"Saya kira ini insentif yang menjanjikan. Nanti mungkin ada yang lain," katanya.

Presiden Jokowi menambahkan Hotel Nusantara yang dibangun melalui kocek investor swasta dalam negeri merupakan bukti bahwa IKN menyimpan potensi investasi yang sangat menjanjikan.

"Kalau tidak dalam hitungan-hitungan kalkulasi dalam perhitungan untung-ruginya tidak ada, enggak mungkin mau memulai membangun itu," katanya.

Pewarta : Andi Firdaus

Editor : Adi Lazuardi



ANTARA/Andi Firdaus

Presiden RI Joko Widodo saat berpidato dalam agenda peletakan batu pertama Hotel Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diikuti melalui video tayangan langsung Sekretariat Presiden dari Jakarta, Kamis (21/9/2023).

TARIK MINAT INVESTOR, JOKOWI MINTA KESIAPAN TANAH DAN INFRASTRUKTUR DI IKN HARUS DIPERCEPAT

PENAJAM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kesiapan tanah dan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) harus dipercepat untuk merespons minat para investor swasta domestik dan mancanegara yang kini berdatangan.

"Saya melihat, justru kesiapan tanah ini yang harus dipercepat, plus infrastrukturnya, karena kita dikejar-kejar oleh investor," kata Presiden Jokowi usai peletakan batu pertama Hotel Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (22/9/2023).

Ia mengatakan dalam kurun setahun terakhir konsentrasi pemerintah dalam pembangunan IKN fokus pada realisasi infrastruktur dasar, seperti gedung-gedung kementerian dan juga Istana Kepresidenan.

Sedangkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang layanan publik akan dipenuhi melalui investasi sektor swasta.

Salah satunya ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Hotel Nusantara berbintang lima di Penajam Paser Utara, kata Jokowi menambahkan.

"Besok ada rumah sakit, besok ada distribution center, dan nanti di November

ada universitas, hotel lagi dan lain-lain. Karena kuncinya ada di situ (sektor swasta), karena urusan pemerintah hanya di urusan gedung pemerintahan, infrastruktur, dan juga Istana Presiden," katanya.

Rencana pembangunan sejumlah fasilitas publik di IKN yang disebutkan Jokowi, sepenuhnya datang dari investasi sektor swasta domestik.

"Itu kita bicara baru yang dari dalam negeri, belum berbicara yang dari luar negeri. Sehingga saya harapkan ground breaking pada sore hari ini, menunjukkan bahwa private sector diharapkan sangat tertarik masuk ke IKN," ujarnya.

Masuknya beragam investasi sektor swasta di IKN, kata Jokowi, tak lepas dari kebijakan pemerintah yang memfasilitasi kebutuhan infrastruktur dasar, salah satunya jalan tol yang telah rampung dikerjakan.

Selain itu, Jokowi juga menargetkan pembangunan Bandara di wilayah setempat rampung pada tahun ini.

"Kalau dua ini selesai, saya rasa akan semakin banyak yang akan datang. Saya yakin itu," katanya. (Ant/MK)

Pewarta : Andi Firdaus

Editor : Adi Lazuardi



Robbi/MediaKaltimGroup

Kepala Diskominfo PPU, Khairudin saat menunjukkan pesan penipuan yang mencatut nama Pj Bupati PPU, Makmur Marbun.

NAMA PJ BUPATI PPU DICATUT PENIPU, MINTA SEJUMLAH PEJABAT KIRIM UANG

PPU - Baru dua hari resmi menjabat sebagai Pj Bupati Penajam Paser Utara, nama Makmur Marbun disalahgunakan. Yakni dengan menipu sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab PPU untuk mengirimkan sejumlah uang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU, Khairudin mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut. Bahkan dirinya turut menerima pesan yang dikirimkan dari nomor 081399921117 tersebut.

"Sejumlah pegawai eselon II di lingkungan pemerintah Kabupaten PPU, mendapatkan pesan untuk mengirimkan uang,"

ujarnya, Kamis (21/9/2023).

Beberapa pegawai juga sempat berkomunikasi dengannya untuk memastikan hal tersebut. Maka dari itu ia juga mengupayakan untuk mengklarifikasi kebenaran pesan tersebut ke yang bersangkutan.

"Saya sudah komunikasi ke sana bahwa itu bukan nomor pak Pj Bupati PPU," kata Khairuddin.

Dari konfirmasi tersebut, ia menyatakan bahwa pesan yang tersebar sejak 20 September 2023 itu adalah modus penipuan dengan mencatut nama. Walau begitu, menurutnya tidak ada korban dalam kasus penipuan ini.

Pegawai yang ada di Kabupaten PPU dianggap sudah paham dengan modus seperti itu. "Saya yakin teman-teman di perangkat daerah itu sudah jeli dan paham," sebutnya.

Lebih lanjut, Khairudin berpesan pada seluruh kalangan untuk tetap waspada jika ada pesan yang mengatasnamakan Pj Bupati PPU Makmur Marbun. Bila menemukan hal serupa, diminta untuk berhati-hati dan melakukan konfirmasi terlebih dahulu.

"Harus lebih berhati-hati baik itu nama Pj, kepala dinas atau siapapun harus bisa dikonfirmasi lagi," pungkasnya. **(SBK)**



Robbi/MediaKaltimGroup

Ketua KPU PPU Irwan Sahwanan saat memberikan materi sosialisasi dihadapan siswa-siswi di SMA Negeri 8 beberapa waktu lalu.

SASAR PEMILIH PEMULA GEN Z, KPU PPU RUTIN MASUK SEKOLAHAN

PPU - Pemilih pemula menjadi salah satu prioritas dalam sosialisasi yang dilakukan KPU Penajam Paser Utara (PPU). Menjangkau yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya agar mendapatkan informasi Pemilu 2024 yang memadai.

Ketua KPU PPU, Irwan Sahwana mengatakan pihaknya tengah rutin menggelar kegiatan KPU Goes to School. Dalam upaya memberikan sosialisasi pendidikan pemilih pemula dalam kegiatan project penguatan profil pelajar Pancasila kurikulum merdeka belajar ke pada peserta didik.

"Kegiatan sosialisasi ini adalah bentuk dari rangkaian sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pemilu KPU PPU pada basis pemilih pemula," ujarnya, Kamis (21/9/2023).

Dengan bekerjasama dengan beberapa sekolah SMA/SMK sederajat yang saat ini melaksanakan program merdeka belajar. Untuk kegiatan penguatan projek profil pelajar Pancasila (P5) dalam

tema 'suara demokrasi'.

Dalam giat tersebut, KPU PPU memberikan informasi terkait kepemiluan dasar. Seperti hal, kapan pelaksanaan pemungutan suara untuk Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

"Bagaimana mengetahui apakah Kita sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, nama-nama dan jumlah parpol peserta pemilu 2024 tingkat nasional," jelasnya.

Kemudian terkait jumlah kursi dan daerah pemilihan DPRD PPU, jumlah keterwakilan perempuan dalam Bacaleg DPRD PPU. Lalu jumlah DPT PPU saat ini, hingga jumlah TPS Reguler dan TPS Loksus yang sudah ditetapkan oleh KPU PPU.

"Tidak lupa juga kami menyampaikan syarat syarat sebagai pemilih dalam pemilu 2024 mendatang. Informasi 5 jenis surat suara dalam pemilu dan tingkatannya serta pembedanya dan lainnya," teran Irwan.

Satu sisi, ini juga upaya penyelenggara Pemilu untuk mening-

katkan partisipasi pemilih pada 2024 mendatang. Seperti diketahui, target partisipasi yang tengah dikejar nantinya ialah sebesar 80 persen pemilih. Dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 134.383 pemilih.

"Ini tantangan buat Kami dalam merealisasikannya," sebutnya.

Adapun dari jumlah DPT itu, terbagi dari kalangan terbesar yakni Milenial (27-42 tahun) sebanyak 46.954 pemilih dan Gen X (43-58 tahun) sebanyak 38.803 pemilih. Kemudian disusul Gen Z (11-26 tahun) sebanyak 30.041 pemilih dan Baby Boomer (59-77 tahun) 16.956 pemilih serta Pre Boomer (di atas 78 tahun) sebanyak 1.629 pemilih.

"Sasarannya adalah, Kami ingin menjangkau jumlah pemilih pemula dari kalangan Gen Z yang ada di PPU, agar ikut menyalurkan suaranya pada 2024 mendatang. Dengan tagline Kami tanggal 14 Februari sebagai hari KASIH SUARA Nasional," pungkas Irwan. **(SBK)**



Robbi/MediaKaltimGroup

Pj Bupati PPU Makmur Marbbun saat menyampaikan pesan pada seluruh pegawai di lingkungan kerjanya, Kamis (21/9/2023).

INI PESAN SERIUS MAKMUR UNTUK ASN PPU DI APEL PERDANA

PPU - Perdana melakukan apel di Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), Pj Bupati PPU Makmur Marbbun memberikan pesan serius pada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Yakni menuntut peran dan tanggung jawab yang diberikan dalam memastikan kemajuan daerah dan roda pemerintahan Benuo Taka.

"ASN adalah tulang punggung dari pelaksanaan pemerintahan di daerah. Bapak-Ibu adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya, Kamis, (21/9/2023).

Salah satu yang mesti dilakukan ialah, bisa bekerja cepat dan tanggap dalam menjawab setiap situasi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Serta secara terus menerus mengembangkan kemampuan yang kita miliki.

"Waktu kita tidak banyak.

Berbagai regulasi dan kebijakan memerlukan tindak lanjut secara nyata agar dapat memberikan efek yang positif bagi masyarakat. Sebagai abdi dan pelayan masyarakat, kita perlu merespon perubahan yang terjadi sehingga kita dapat berkontribusi terhadap kemajuan daerah," jelas Makmur.

Ia juga meyakini seluruh pegawai dapat bekerja secara cepat, profesional serta inovatif di bidang kerja masing-masing. Terlebih pada era digital seperti saat ini, yang diawasi langsung dan berhadapan dengan masyarakat.

"Melalui sosial media, masyarakat memantau kinerja para abdi negara dan tidak segan memberikan kritik pedas atas setiap program kerja yang dilakukan," sebutnya.

Selain itu, imbauan untuk ASN jelang Pemilu 2024 juga tak luput dari pandangannya. Ia mengatakan seluruh ASN di lingkungan PPU agar senantiasa menjaga netralitas. Segala bentuk praktik politik praktis atau memperlihatkan pemihakannya kepada pasangan calon tertentu, dilarang.

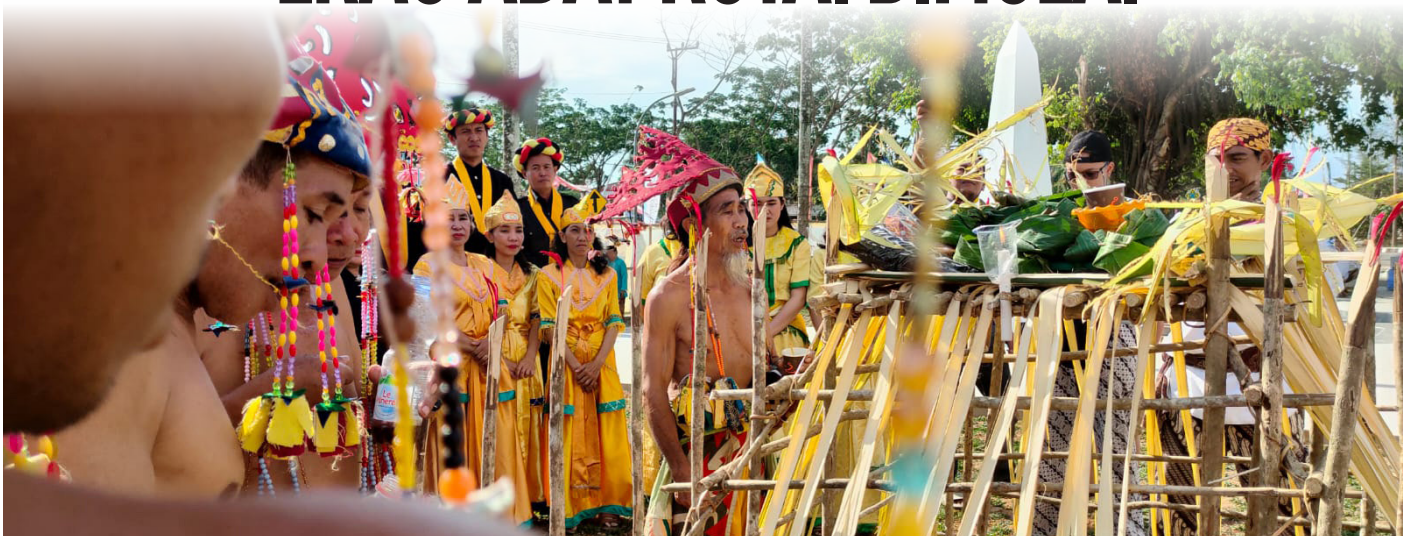
"Saya ingin mengingatkan, semua akan pentingnya integritas dan netralitas sebagai ASN. Apalagi di tahun 2023 menjelang tahun politik 2024. Kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Setiap tindakan dan keputusan kita harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang berkualitas," pungkasnya.

Pewarta : Nur Robbi

Editor : Nicha Ratnasari



MENJAMU BENUA TANDAI RANGKAIAN ERAU ADAT KUTAI DIMULAI



**MANAJEMEN BORNEO FC TERUS
TINJAU CALON HOME BASE BARU**



Rafi'i/Media Kaltim

Ritual Menjamu Benua yang dilakukan di hadapan Museum Mulawarman Tenggarong.

MENJAMU BENUA TANDAI RANGKAIAN ERAU ADAT KUTAI DIMULAI

TENGGARONG - Dewa sam-bil komat-kamit mengucapkan mantra-mantra di hadapan sesajen. Ada 41 jenis makanan yang jadi sesajen, diantaranya nasi tambak, nasi ragi, ayam panggang, ayam yang masih hidup, mandau dan air minum. Dalam

prosesnya, musik gamelan dan gendang terus mengiringi selama prosesi.

Sambil sesekali menebar para dewa menebar beras kuning. Didampingi 7 pangkon laki, 7 pangkon bini, 7 dewa, dan 7 belian. Ritual inipun dinamakan Menjamu Benua. Menjadi salah satu rangkaian dari Erau Adat Kutai, yang secara resmi dibuka pada Minggu (24/9/2023) nanti.

Tiga tempat yang jadi lokasi Menjamu Benua. Kepala Benua di Depan Kantor Bupati Kukar, Tengah Benua di depan Museum Mulawarman dan Ekor Benua di Tanah Habang Kelurahan Mangkurawang.

Secara makna dan kepercayaan, Menjamu Benua menjadi prosesi adat untuk mengingat para leluhur. Sebagai media komunikasi dengan makhluk halus atau gaib

untuk meminta keselamatan selama pelaksanaan Erau Adat Kutai.

"Meminta keselamatan kepada orang halus di sekitar Tenggarong untuk menjaga keselamatan orang yang datang," ujar Kerabat Kesultanan Bidang Sakral, Awang Imaludin.

Pria yang memiliki gelar Awang Demang Natakrama inipun, berharap pelaksanaan Erau Adat Kutai dapat berjalan sukses seperti tahun-tahun sebelumnya. Serta menjaga ketertiban dan adat istiadat bagi masyarakat Tenggarong, maupun para pengunjung dari luar Tenggarong.

"Selaku pengurus adat meminta agar pengunjung erau menjaga ketertiban dan keamanan," tutupnya.

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari





Istimewa

Suasana pengecekan Stadion Aji Imbut oleh manajemen Borneo FC bersama Dispora Kukar.

Manajemen Borneo FC Terus Tinjau Calon Home Base Baru

TENGGARONG - Peluang Borneo FC pindah home base ke Stadion Aji Imbut Kutai Kartanegara (Kukar), semakin terbuka lebar. Bahkan manajemen klub berjudul Pesut Etam ini, telah melakukan peninjauan kondisi lapangan dan fasilitas yang dimiliki Stadion Aji Imbut, pada Rabu (20/9/2023) malam.

Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kukar, Aji Ali Husni. "Jadi memang ada wacana dari manajemen Borneo FC untuk menjadikan Stadion Aji Imbut, sebagai kandang mereka selama putaran kedua liga 1 musim 2023-2024," kata Ali, pada radarkukar.com, Kamis (21/9/2023).

Ia mengatakan, klub sepakbola asal kota Samarinda ini terpaksa harus mencari kandang baru. Lantaran Stadion Segiri Samarinda yang selama ini menjadi markas Borneo FC akan direnovasi.

Dipilihnya stadion yang memiliki kapasitas 35 ribu penonton ini buka tanpa alasan. Selain lokasi Tenggarong yang terbilang dekat dari Kota Samarinda. Stadion Aji Imbut juga sebelumnya pernah dipakai oleh Mitra Kukar FC dalam mengarungi kasta tertinggi kompetisi sepakbola Indonesia.

"Tapi sampai saat ini pembicaraan masih

terus kita lakukan. Memang secara umum fasilitas di Stadion Aji Imbut ini masih sangat memungkinkan," ujar Ali.

Ali juga tidak menampik jika kondisi Stadion termegah di Kukar ini masih memerlukan perbaikan dan perawatan, bila Borneo FC jadi pindah kandang ke Stadion Aji Imbut.

Berdasarkan keterangan Ali, beberapa kabel lampu di tribun timur Stadion Aji Imbut menghilang. Pihaknya juga masih harus melakukan perawatan pada rumput lapangan agar sesuai dengan standar liga 1.

"Makanya kami juga berbicara dengan manajemen Borneo FC, ada kemungkinan mereka mau membantu untuk perbaikan lampu," tambahnya.

Jika wacana ini terealisasi, nantinya Borneo FC akan memainkan seluruh pertandingan kandang pada putaran kedua di Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang. Ini diyakini dapat menumbuhkan kembali gairah sepakbola di Kukar.

"Prinsipnya kita siap mendukung pengalihan lapangan di Stadion Aji Imbut. Ini bagian dari upaya kita juga sesama pembinaan olahraga khususnya olahraga sepak bola," pungkasnya.

Pemulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Ilustrasi penerimaan Pegawai PPPK.

Istimewa

Kukar Resmi Kebagian 2.999 Formasi PPPK, Prioritas Nakes dan Guru

TENGGARONG- Pemerintah pusat secara resmi kembali membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2023. Penerimaan ini berlaku secara berjenjang, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Di Kutai Kartanegara (Kukar) sendiri, penerimaan CPNS tahun ini dibuka sejak hari Rabu (20/9/2023). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menyiapkan 2.999 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penerimaan ini khusus untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Hal tersebut tertuang dalam surat bernomor P-1/BKPSDM/PPI.1/800/1/2/9/2023, yang ditandatangani Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, selaku ketua panitia seleksi calon PPPK Kukar 2023.

Dalam surat yang ditandatangani 19 September 2023 tersebut, untuk formasi guru diprioritaskan untuk Pelamar Prioritas (P1). Yaitu peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional (JF) guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya.

Selain itu, eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yaitu yang terdaftar dalam database eks THK-II Badan Kepegawaian Negara.

Untuk guru non ASN di sekolah negeri terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

Sementara untuk tenaga kesehatan diprioritaskan untuk eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yaitu yang terdaftar dalam database eks THK-II BKN. Dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Tenaga Non ASN yaitu pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat ia mendaftar.

Sebagaimana diketahui, Pemkab Kukar telah be-

rupaya agar para Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer di Kukar diprioritaskan untuk diusulkan pengangkatannya menjadi PPPK. Upaya ini berangkat atas rencana pemerintah pusat yang berencana menghapus THL di instansi pemerintah di tahun 2023 ini, namun sayangnya dibatalkan.

Hal tersebut menjadi langkah pemerintah daerah untuk meminimalisir dampak dari permasalahan ini. "Yang pasti kami menunggu arahan pemerintah pusat. Mulai dari kebijakan, pembiayaan, tata cara, dan lain-lain," sebutnya.

Sunggono melanjutkan, Bupati Kukar, Edi Damansyah, juga telah berusaha bersurat ke pemerintah pusat. Agar Pemkab dilibatkan dalam pengadaan PPPK di daerah supaya bisa mengambil peran untuk memprioritaskan THL diangkat menjadi PPPK.

Bahkan, Bupati Edi mengusulkan agar Non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang sudah mengabdikan 5 tahun dapat diangkat jadi PNS dan PPPK tanpa tes. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, total PNS di Kukar mencapai 12.500 orang.

Namun pada 2022, jumlah ASN yang pensiun mencapai 500 orang. Selain itu, Kukar juga memiliki 743 orang PPPK, serta dibantu tenaga honorer. Total tenaga honor Kukar mencapai 6.766 orang.

Edi meminta agar perekrutan PNS dan PPPK yang dilakukan pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, pemerintah daerah yang notabene lebih mengetahui secara nyata kondisi daerahnya.

"Ini yang terus kita perjuangkan agar perekrutan ASN dan PPPK melibatkan daerah. Bahkan yang sudah mengabdikan 5 tahun kita usulkan untuk diangkat langsung tanpa tes," tegas Edi.

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Istimewa

Menyumpit menjadi salah satu oltrad yang akan dipertandingkan di Erau Adat Kutai.

Diprediksi Ribuan Peserta, KORMI Kukar Gelar Event Oltrad Selama Erau Adat Kutai

TENGGARONG - Pecinta olahraga tradisional akan kembali menunjukkan aksi dan skill-nya. Bertepatan dengan pelaksanaan Erau Adat Kutai, sebanyak 12 cabang olahraga tradisional (oltrad) akan dipertandingkan selama sepekan, sejak 24-30 September 2023, di Halaman Kedaton Kutai Kartanegara.

Oltrad yang dipertandingkan di antaranya Behempas Bantal, Belogo Beregu, Belogo Perorangan, Dagongan, Enggrang, Gasing Baturai, Gasing Bepepal Beregu, Gasing Bepepal Perorangan, Gasing Berajaan, Hadang, Kelom Panjang, Menyumpit, Panahan Tradisional dan Katapel Tradisional.

Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kukar, Lukman, sangat mengapresiasi keterlibatan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar yang memfasilitasi event oltrad dalam Erau Adat Kutai. Karena memang ini selain menjadi ajang silaturahmi dan pelestarian kebudayaan yang menja-

di kearifan lokal, juga sebagai ajang pencarian bibit baru.

"Karena pengembangan oltrad sudah berakar di masyarakat, tapi kadang-kadang pegiat olahraga agak jenuh kalau latihan atau belajar saja kalau tidak dibuatkan event," ungkap Lukman, Kamis (21/9/2023).

Tahun ini, Lukman memastikan akan berlangsung meriah. Karena diprediksi ada ribuan peserta dan pegiat oltrad yang akan ambil bagian di Erau Adat Kutai. Di mana event digelar secara terbuka. Peserta pun tentunya berasal dari 20 kecamatan se-Kukar dan kabupaten/kota lainnya di Kaltim. Seperti Kutai Barat (Kubar), Samarinda, Bontang, Kutai Timur (Kutim) hingga Mahakam Ulu (Mahulu).

"Peserta perkiraan yang ikut mencapai ribuan peserta, karena satu jenis oltrad itu bisa mencapai 100 hingga 200 peserta," tutup Lukman.

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



SEMINAR SOFT SKILL HADAPI DUNIA KERJA, WAWALI INGINKAN PENCARI KERJA TINGKATKAN SDM

BACA HALAMAN A2



PT Badak LNG Dampingi Panen Rumput Laut di Tihi-tihi, Miliki Potensi Pengembangan Destinasi Wisata



Seminar Soft Skill Hadapi Dunia Kerja, Wawali Inginkan Pencari Kerja Tingkatkan SDM

BONTANG – Seminar soft skill menghadapi dunia kerja dalam membangun tenaga kerja Kota Bontang yang berdaya saing dibuka oleh Wakil Wali Kota Bontang, Najirah pada Kamis (21/9/2023) bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Seminar soft skill ini menghadirkan pembicara nasional Anggi V Goenadi dari Bota Public Speaking dan Laela Siddiqah sebagai psikolog.

Wakil Wali Kota Bontang, Najirah mengatakan pemberian soft skill kepada masyarakat pencari kerja sangat berguna bagi kebutuhan pencari kerja. Kota Bontang juga memiliki angka pengangguran terbilang tinggi.

Najirah mengatakan dengan mengikuti pelatihan akan dapat mengetahui kebutuhan pencari kerja. "Kota Bontang yang menjadi tujuan pencari kerja bagi masyarakat, sehingga menambah angka kenaikan pengangguran," kata Najirah.

Selanjutnya, Najirah mengatakan adanya lapangan pekerjaan akan mengurangi angka pengangguran di Kota Bontang. "Bontang sebagai miniatur Indonesia, sehingga menjadi Kota tujuan," katanya.

Sementara, Ia mengatakan seminar dan pelatihan-pelatihan soft skill dapat mempersiapkan masyarakat atau generasi muda Kota Bontang dapat bersaing



YAHYA/MEDIA KALTIM

Seminar soft skill yang dibuka langsung Wakil Wali Kota Bontang.

dalam dunia pekerjaan.

"Saya meminta kepala Disnaker Kota Bontang bekerja sama dengan BLKI bagaimana mempersiapkan masyarakat Bontang dapat siap dengan SDM-nya," ungkap Najirah.

Hal lainnya, Najirah katakan kesiapan masyarakat Kota Bontang harus didukung oleh pemerintah Kota Bontang. Dengan besarnya kebutuhan tenaga kerja yang profesional dan terdidik

merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan.

"Kualitas SDM berkaitan dengan kualitas tenaga kerja yang mampu berkompetensi dalam perkembangan dunia kerja. Salah satu faktor terjadinya pengangguran adanya kesenjangan informasi antara pemberi kerja dan pencari kerja," terangnya. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



IST

Ilustrasi pembangunan masjid.

Mengapa Masyarakat Bangun Gedung Secara Swadaya Diawasi Dinas PUPR? Ini Alasannya

BONTANG – Setiap bangunan gedung yang dibangun oleh masyarakat, meskipun berasal dari dana swadaya namun harus tetap dalam pengawasan Bidang Bina Konstruksi (Bikon) Dinas PUPR Bontang.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang, Usman melalui Kabid Bina Konstruksi (Bikon), Dedy Nugraha.

Dikatakan Dedy, pengawasan dari Bikon PUPR Bontang tersebut masih banyak yang belum diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Karenanya pihaknya akan terus mensosialisasikan hal tersebut, baik ke tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Pengawasan bangunan swadaya masyarakat ini sebenarnya tugas baru bagi Bikon PUPR Bontang. Sebelumnya Bikon bertugas untuk memberikan pelatihan bagi tukang-tukang bangunan yang belum punya sertifikat, atau menguruskan bagi yang belum memiliki sertifikat, mati, atau kadaluarsa.

Kemudian bertambah tugas pengawasan ter-

hadap 3 T (Tertib usaha, Tertib penyelenggaraan/ pemanfaatan, dan Tertib K3).

"Tugas Tertib K3 ini adalah pengawasan K3 untuk gedung-gedung, sesuai Permen PU No 1 Tahun 2023 pengawasan konstruksi," bebernya.

Ditambahkannya, pengawasan tersebut tidak hanya untuk bangunan milik pemerintah dan swasta. Tapi termasuk juga pengawasan pembangunan masyarakat yang berasal dari dana swadaya.

Menurutnya, pengawasan ini perlu dilakukan lantaran terkait gagal atau runtuhnya bangunan. Jangan sampai apabila ada permasalahan pada konstruksi bangunan tersebut wali kota yang disalahkan.

"Misalnya bangunan masjid, kemudian runtuh dan ada korban. Lalu wali kota yang disalahkan. Nah sebelum itu terjadi, bikon harus lakukan pengawasan. Benarkah sudah ada ijin-ijinnya, apakah perhitungan sudah dilakukan oleh insinyur/arsitektur sipil, apakah sudah diawasi oleh ahlinya, dan sebagainya," jelasnya. (al/adv)



YUSVA ALAM

Kegiatan pelatihan instalasi baja ringan beberapa waktu lalu di Kantor PU lama.

Para Tukang Bangunan Jangan Lewatkan Kesempatan Ini! Pelatihan Gratis Sertifikasi BNSP

BONTANG – Selain akan mengadakan pelatihan operator alat berat, Bidang Bina Konstruksi (Bikon) Dinas PUPR Bontang juga akan mengadakan pelatihan tukang bangunan gedung.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang, Usman melalui Kabid Bina Konstruksi (Bikon), Dedy Nugraha.

Dikatakan Dedy, pelatihan tukang bangunan gedung ini rencananya akan digelar di Bulan Oktober 2023 bersamaan dengan pelatihan operator alat berat. Namun kegiatan berlangsung di tempat yang berbeda, apabila pelatihan operator alat berat di Kantor PU lama di Jalan DI Pandjaitan, Kelurahan Bontang Baru, sementara pelatihan tukang di Uni-

versitas Trunajaya.

"Dana pelatihan ini mendapat anggaran dari Kementerian PUPR, sehingga gratis untuk seluruh peserta. Jadi masyarakat khususnya profesi tukang harus memanfaatkan betul pelatihan ini," ujar Dedy saat diwawancara redaksi Radarbontang.com.

Ditambahkannya, anggaran dari kementerian ini hanya ada di tahun 2023. Tahun 2024 sudah tidak ada lagi. Karenanya, mumpung gratis harus dimanfaatkan betul. Kalau ikut pelatihan mandiri, tentu harganya mahal.

Kuota peserta yang ditampung mencapai 50 peserta. Durasi waktu pelatihan selama 12 hari, 2 hari teori dan sisanya praktek dan uji kompetensi.

Sementara Syarat peserta jenjang

1, yaitu peserta dengan pendidikan lulusan SD dan SMP pengalaman minimal 0 tahun, dan peserta non pendidikan (dengan PBK) pengalaman minimal 2 tahun.

Beberapa jenis skill tukang yang akan diajarkan, di antaranya tukang pasang batu, batako, pembesian beton, kayu, dan pengecatan.

"Pelatihan dari pondasi hingga menjadi satu bangunan utuh," imbuhnya.

Peserta akan mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) yang terstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan sertifikasi standar BNSP akan bisa digunakan di tingkat nasional atau seluruh wilayah Indonesia, bahkan digunakan untuk proyek atau bekerja di IKN. (al/adv)

PT Badak LNG Dampingi Panen Rumput Laut di Tihi-tihi, Miliki Potensi Pengembangan Destinasi Wisata

BONTANG – Perusahaan PT. Badak LNG (PTB) mendampingi warga Tihi-tihi Kelurahan Bontang Selatan melakukan panen rumput laut yang diadakan pada Kamis (21/9/2023).

Hadir dalam panen rumput laut yakni Direktur dan COO PT Badak, Teten Hadi Rustendi, Senior Manager Corcomm PT Badak, Yuli Gunawan, kepala Dispopar Bontang, Ahmad Aznem dan perwakilan Dinas PUPR dan DKP3 Bontang.

Direktur dan COO PT Badak LNG, Teten Hadi Rustendi mengatakan melalui kegiatan panen rumput laut ini, perusahaan ingin memiliki tanggung jawab baik peningkatan SDM dan peningkatan fasilitas infrastruktur yang ada di perkampungan terapung Tihi-tihi. Ia mengatakan mendukung dan komitmen Tihi-tihi dalam pengembangan untuk tujuan wisata.

"Membantu Tihi-tihi dalam pengembangan desa untuk menjadi tujuan wisata bukan hanya PT Badak tapi juga stakeholder yang berada di sekitar perkampungan Tihi-tihi," kata Teten Hadi Rustendi, Kamis (21/9/2023).

Teten menambahkan mengenai panen rumput laut ini, agar mitra yang ada di perkampungan Tihi-tihi dapat bekerja sama dengan PT Badak LNG.

"Begitu juga teman-teman di sini dapat menjaga komunikasi. Jadi kita akan mendatangi 3 sampai 4 bulan lagi, apakah akan tambah maju lagi dari sebelumnya. Ini akan berlanjut kita lakukan. Bagaimana mengubah Tihi-tihi menjadi salah satu tujuan wisata," kata Teten.

Sementara, Senior Manager Corcomm PT Badak LNG, Yuli Gunawan menjelaskan bantuan dan panen rumput laut merupakan salah satu program CSR PT Badak LNG yang melakukan kolaborasi kepada beberapa stakeholder perusahaan dan pemerintah dengan menginisiasi masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan.

"Kami mendorong diversifikasi yang dulu ada budi daya rumput laut sempat terhenti kita kembangkan lagi hingga pengembangan keramba jaring apung. Kita juga mengenalkan pelampung rumput laut sekaligus alat navigasi," kata



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Direktur dan COO PT Badak LNG, Teten Hadi Rustendi bersama jajaran dan kepala dinas Dispopar saat mendampingi panen rumput laut.

Yuli Gunawan.

Yuli menambahkan program CSR ini mendorong program awal bersama perusahaan lain dengan cara kolaborasi dengan beberapa stakeholder untuk bekerja sama dan mendorong potensi destinasi wisata yang dimiliki Tihi-tihi.

"Karena dekatnya dengan tempat wisata, sehingga Tihi-tihi juga memiliki potensi wisata dapat dikembangkan. Semoga dengan program kita ini, semua mempunyai atensi (perhatian), jadi kebijakan stakeholder bisa melirik perkampungan Tihi-tihi," ungkapnya.

Yuli mengatakan dalam pengembangannya, akan terus mendampingi masyarakat agar dalam pengolahan rumput laut terpenuhi dalam segala sektor selain pemenuhan inovasi dari PT Badak.

"Semua akan memberikan kontribusinya kepada Tihi-tihi dengan cara kolaborasi bersama. Trennya saat ini berkolaborasi," terangnya.

Mewakil kelompok nelayan Menara Marina, Indra mengatakan terima kasih atas pengadaan bibit rumput laut pada tahun ini yang telah dilakukan PT. Badak LNG dan telah melakukan panen rumput laut.

"Terima kasih kepada CSR PT Badak membantu bibit dan melakukan panen pada hari ini. Saya mewakili masyarakat

agar ke depannya Tihi-tihi dapat dijadikan destinasi wisata. Lebih banyak potensinya juga," katanya.

Indra mengharapkan semua perusahaan yang ada di sekitar perkampungan Tihi-tihi dapat bekerja sama dalam mengembangkan pembangunan di Tihi-tihi.

"Semua perusahaan di sini bekerja sama dalam pembangunan Tihi-tihi bisa cepat berjalan," katanya.

Selain panen rumput laut di Tihi-tihi, PT Badak LNG juga memberikan bantuan kepada Sekolah SDN 016 Tihi-tihi berupa paket seragam guru dan murid, paket perlengkapan alat olahraga, tas dan perlengkapan alat tulis yang diterima langsung oleh kepala sekolah SDN 016 Tihi-tihi, Tri Ayuningsi Pujiastuti.

"Selain pengembangan masyarakat, kita juga tidak melupakan pemberian bantuan atau donasi kepada sekolah. Kita mendapatkan informasi sekolah di Tihi-tihi membutuhkan penambahan fasilitas seperti perlengkapan sekolah, seragam dan alat olahraga. Ke depannya kita lihat lagi apa saja yang diperlukan di sekolah, kita sifatnya sesuai yang dibutuhkan sekolah," tambah Yuli Gunawan. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



Wawali Najirah (3 dari kiri) saat hadir bimtek Bapenda.

Bapenda Libatkan Perangkat RT Jadi Petugas Pendata Obyek PBB-P2

BONTANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Validasi Obyek Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2023.

Kegiatan tersebut diadakan pada Rabu (20/09/2023) pagi di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang. Mengundang perangkat RT dan Karang Taruna se-Kota Bontang sebagai peserta.

Wakil Wali Kota (Wawali) Bontang Najirah menyampaikan, untuk mewujudkan pembangunan yang mencerminkan prioritas dan kepentingan masyarakat lokal dibutuhkan sumber pendapatan yang memadai.

Sesuai dengan semangat otonomi daerah, penyerahan kewenangan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi harus disertai dengan penyerahan pembiayaan, prasarana, personil dan dokumen sesuai dengan kewenangan yang diserahkan.

"Pemkot Bontang mencurahkan konsentrasi besar terhadap upaya menggal sumber-sumber penerimaan daerah. Tujuannya tidak lain tentu hanya berupaya memaksimalkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan di Kota Bontang," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan fenomena Bontang yang bergantung pada dana transfer, akan menjadi ancaman nyata ketika terjadi instabilitas pendapatan negara dalam APBN dan berdampak pada penyaluran dana transfer ke daerah.

"Karenanya, harus ada perubahan mindset. Kita harus mampu berdiri

sendiri, menciptakan sumber pendapatan untuk mampu membiayai secara mandiri urusan di daerah," ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia memberikan apresiasi terhadap Bapenda yang melibatkan mitra pemerintah yakni perangkat rt dan karang taruna sebagai petugas pendata obyek PBB-P2 di seluruh kelurahan.

"Pelibatan perangkat rt maupun karang taruna tentu menjadi komitmen kita menghasilkan database yang handal, mutakhir dan bisa dipertanggungjawabkan," tandasnya.

Diharapkan melalui database yang valid, pemerintah dapat melahirkan program-program yang tepat sasaran kepada masyarakat.

Editor: Yusva Alam



SYAKURAH/RADARBONTANG

Kabid Piak dan Pemanfaatan Data, Muhammad Thamrin.

Fokus Perekaman KTP Anak Agar Punya Hak Pilih

BONTANG - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang sedang berfokus untuk perekaman KTP anak menuju usia 17 tahun.

Hal ini dilaksanakan dalam rangka, agar semua anak yang berusia di bawah 17 tahun di Kota Bontang memiliki KTP dan bisa mengikuti pemilu. Kabid Piak dan Pemanfaatan Data, Muhammad Thamrin mengatakan, bahwa hal ini sedang urgent dilakukan oleh Disdukcapil.

Pihak Disdukcapil tidak bisa memastikan perekaman KTP bisa mencapai 100 persen, karena beberapa anak Bontang ada yang bersekolah di luar kota. Data keluarga memang di Bontang, jadi data yang belum perekaman ada semua.

"Kami memberitahu orang tua mereka untuk melakukan perekaman di daerah tempat anak itu berada, itu diperbolehkan," jelasnya.

Iklan juga sudah dipasang di berbagai macam tempat, agar mengimbau anak-anak segera perekaman KTP sebelum

pemilu. Sehingga tidak harus menunggu berumur 17 tahun baru perekaman. Misalnya pada Bulan Januari atau Februari seorang anak akan berusia 17 tahun, sudah bisa dilakukan perekaman dari sekarang.

"Kalau sudah melakukan perekaman dari sekarang nanti ketika dia berumur 17 tahun tinggal ambil saja KTPnya," imbuhnya.

Perekaman tidak hanya dilakukan di Disdukcapil, warga bisa menuju kecamatan atau ke Mal Pelayanan Publik (MPP). Di sana mereka juga melayani perekaman tersebut.

Meskipun sedang fokus menjalani perekaman KTP, Disdukcapil sekaligus melakukan program lainnya seperti pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar penerapannya tetap berjalan.

"Jadi kami harap perekaman KTP ini bisa berjalan baik, karena jemput bola juga sudah kita lakukan ke sekolah-sekolah," harapnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam



IST

Tante dan ponakannya diamankan pihak kepolisian usai kedapatan edarkan sabu.

Kompak! Tante dan Ponakan Edarkan Sabu

BONTANG – Satresnarkoba Polres Bontang bersama Unit Reskrim Polsek Bontang Selatan kembali meringkus dua pengedar sabu, Rabu (20/9/2023) sore.

Awalnya pada pukul 17.00 Wita polisi menangkap seorang perempuan berinisial SU 46 tahun.

Warga Tanjung Laut itu ditangkap di rumahnya, bersama barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 15 bungkus atau seberat 4,02 gram.

Diungkapkan Kapolsek Bontang Selatan, Iptu Muhammad Rakib Rais sabu itu disimpan di dalam kamar tepatnya di dalam tas belanja.

"Katanya dapat dari keponakannya, kami sita sabu dan beberapa barang bukti lainnya seperti uang, HP, alat hisap, dan lain-lain," katanya

mengutip dari Polresbontang.com.

Setelah dilakukan pengembangan, polisi berhasil menangkap pemasok sabu bagi SU yang tak lain keponakannya sendiri, yakni JAN pria berusia 26 tahun.

Dia diringkus di rumah orangtuanya, saat berada di atas motor. Sebanyak 6 poket sabu seberat 3,15 gram yang disimpan dalam kotak lampu akhirnya diamankan petugas.

Mereka dijerat pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Ancaman hukuman 20 tahun penjara," tutupnya.

Editor: Yusva Alam



PEMKAB BERAU BERHASIL TERIMA PENGHARGAAN UHC, LEGISLATIF BERI APRESIASI



**ANDI AMIR SALURKAN SEMPROTAN
ELEKTRIK, DUKUNG PENGEMBANGAN
SEKTOR PERTANIAN**



Anggota Komisi I DPRD, Rudi Mangunsong.

PEMKAB BERAU BERHASIL TERIMA PENGHARGAAN UHC, LEGISLATIF BERI APRESIASI

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berhasil meraih penghargaan anugerah Universal Health Coverage (UHC) Award 2023. Hal itu pun turut diapresiasi Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Mangunsong.

Diketahui, penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang sudah berkomitmen mendukung serta menjalankan program jaminan kesehatan nasional. Yakni dengan implementasi masyarakat kepesertaan BPJS Kesehatan.

Dikatakannya, Pemkab Berau telah berupaya melakukan lompatan. Di mana masyarakat di Kabupaten Berau yang baru saja mendaftar BPJS Kesehatan tidak perlu lagi menunggu selama 14 hari untuk dapat memanfaatkan kartu BPJS Kesehatan tersebut.

"BPJS Kesehatan bisa langsung dipakai tanpa menunggu selama 14 hari," ujarnya, Ka-

mis (21/9/2023).

Dalam hal ini Pemkab Berau telah mengambil peran mendaftarkan masyarakat rentan ke BPJS Kesehatan. Serta memastikan seluruh pemberi kerja di daerah untuk mendaftarkan pekerja dan anggota keluarga ke BPJS Kesehatan.

"Lompatan ini sangat luar biasa. Bisa berlaku hari itu juga sebagai jaminan kesehatan," imbuhnya.

Saat ini tinggal bagaimana pemerintah daerah dengan anggaran yang ada bisa memaksimalkan program BPJS Kesehatan tersebut.

"Anggaran Berau banyak tahun ini. Sekarang bagaimana anggaran juga bisa tepat sasaran," tegasnya.

Diharapkan juga seluruh masyarakat Kabupaten Berau yang ada di kampung-kampung juga terdaftar BPJS Kesehatan. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izza

Editor: Dezwan



Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir.

ANDI AMIR SALURKAN SEMPROTAN ELEKTRIK, DUKUNG PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN

TANJUNG REDEB - Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir menyalurkan bantuan berupa semprotan elektrik ke Kelompok Tani Tunas Harapan di Kampung Suka Murya. Hal itu sebagai wujud mendukung perkembangan sektor pertanian.

Dia menerangkan, bantuan itu merupakan bentuk kepeduliannya kepada masyarakat atau petani. Terkhusus yang berada di wilayah konstituennya.

"Ini juga merupakan aspirasi warga di sana ketika saya reses beberapa waktu lalu di Suka Murya," katanya, Kamis (21/9/2023).

Dirinya mengaku, cukup prihatin terhadap para petani di Desa Suka Murya. Sebab, hingga saat ini belum mendapat perhatian dari pihak mana pun.

Terlebih, kata dia, saat melaksanakan reses, didapati banyaknya keluhan masyarakat warga yang mengaku tidak pernah tersentuh oleh bantuan apapun dari pemerintah.

"Saya prihatin dengan peristiwa yang menimpa masyarakat Suka Karya.

Apalagi, mayoritas disana bergantungkan hidup dengan bertani dan berkebun," ungkapnya.

Realisasi penyaluran bantuan ke warga kali ini, kata Amir, masih sebagian kecil dari tahapan penjangkasan aspirasi dari reses sebelumnya dan akan berlanjut sembari menunggu anggaran dari pemerintahan.

"Sementara saya bantu sebisa mungkin. Meskipun tidak seberapa, setidaknya petani disana bisa memiliki dorongan semangat bekerja dari apa yang di perbantukan," tuturnya.

Andi Amir, masyarakat dapat memaksimalkan bantuan yang di berikan saat ini. Juga, bisa memotivasi para petani bahwa masih ada rasa kepedulian dari DPRD Berau sebagai wakil rakyat.

"Ini hanya sebagian kecil. Adapun aspirasi lainnya tentu tetap akan saya kawal dan perjuangkan," pungkasnya. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izza

Editor: Dezwan



WARGA GPA DESAK TRANSPARANSI PEMKOT SOAL PERIZINAN GPA DAN DAUN VILLAGE



**DIMINTA LEBIH KOOPERATIF, PEMKOT
INGATKAN KESEPAKATAN PENGEMBANG
GPA DAN DAUN VILLAGE ATASI BANJIR**



Aksi demo warga GPA RT 42 dan RT 52 Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan di depan kantor Wali Kota Balikpapan.

WARGA GPA DESAK TRANSPARANSI PEMKOT SOAL PERIZINAN GPA DAN DAUN VILLAGE

BALIKPAPAN - Puluhan warga Griya Permata Asri (GPA) bersama mahasiswa mendatangi kantor Wali Kota Balikpapan, pada Kamis (21/9/2023). Mereka meminta Pemerintah Kota Balikpapan untuk mau peduli terhadap nasib warganya yang terendam air.

Saat ini kondisi di Perumahan GPA khususnya RT 42 dan RT 52 tergenang air setinggi 2,5 meter sejak 3 minggu belakangan. Namun untuk wilayah RT 52 sudah hampir 4 bulan.

"Kami sudah cape di datengin ditanya-tanya aja, tapi nggak ada tindakannya juga. Makanya kami kesini memohon bantuan," ujar Kamalia, salah seorang warga terdampak.

Dijelaskan Kamalia, jika kondisi saat ini di mana air telah menggenang setinggi 2,5 meter akibatnya merendam 22 rumah warga. Dan

bahkan saat ini nyaris masuk ke dalam masjid.

"Sudah ada 22 rumah. Dan masjid yang digunakan untuk mengungsi juga hampir masuk air," jelasnya.

Dalam aksinya ini warga pun menuntut Pemerintah Kota Balikpapan untuk merealisasikan drainase di perum GPA RT 42 dan 52 agar air bisa segera surut.

"Kita juga meminta Pemkot Balikpapan untuk membuka transparansi dokumen perizinan pembangunan perumahan GPA dan Daun Village," tutupnya.

Hingga berita ini dimuat, Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud atau pejabat lainnya belum ada menampakkan diri untuk menemui warga yang berorasi.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



WARGA GPA KORBAN BANJIR TUNTUT KEPEDULIAN WALI KOTA BALIKPAPAN

BALIKPAPAN - Warga Griya Permata Asri (GPA) menggelar aksi demo di depan kantor Wali Kota Balikpapan, Kamis (21/9).

Warga menuntut kepedulian Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud terhadap lingkungan di permukiman GPA yang telah terendam air lebih kurang 3 bulan.

Hingga saat ini ada sebanyak 22 rumah yang terendam dengan kondisi yang semakin memprihatinkan.

Puluhan warga GPA mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan khususnya Wali Kota Balikpapan untuk dapat segera memberikan solusi untuk

mengatasi permasalahan tersebut.

Diketahui, banjir yang merendam rumah warga di RT 52 Perumahan GPA Balikpapan Selatan hingga saat ini ketinggian air di beberapa titik telah mencapai 2 meter lebih.

Kondisi itu semakin parah sejak beberapa hari terakhir saat hujan melanda Kota Balikpapan. Air yang merendam rumah warga di GPA sejak Juni 2023 lalu itu pun semakin naik hingga menggenangi rumah pengungsian yang digunakan warga sementara waktu untuk mengungsi. (MK)

Editor : Nicha Ratnasari



Asisten 1 Pemkot Balikpapan, Zulkifli saat memberikan keterangan kepada para warga GPA yang demo..

DIMINTA LEBIH KOOPERATIF, PEMKOT INGATKAN KESEPAKATAN PENGEMBANG GPA DAN DAUN VILLAGE ATASI BANJIR

BALIKPAPAN - Asisten I Pemerintahan Pemkot Balikpapan, Zulkifli menegaskan bahwa pihaknya kembali mengingatkan kepada dua pengembang, yakni pihak Griya Permata Asri (GPA) dan Daun Village untuk membuat kesepakatan terkait penanganan masalah banjir di wilayah RT 52 dan RT 42 Perumahan GPA.

Menurutnya, pihak GPA dan Daun Village harus sama-sama untuk lebih kooperatif dan bergerak untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Kami akan ingatkan lagi kepada kedua pengembang untuk kesepakatan," terang Zulkifli saat menemui para warga GPA RT 52 dan RT 42 serta mahasiswa yang melakukan aksi demo di depan Kantor Wali Kota Balikpapan, Kamis (21/9/2023).

Zulkifli menjelaskan dari Pemkot Balikpapan sudah berupaya untuk memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak mengingat banjir ini merupakan permasalahan dari dua pengembang yaitu dari GPA dan Daun Village. Sebelumnya, kata Zulkifli, sebelumnya, Pemkot juga telah mempelajari instrumen di kawasan sekitar terkait munculnya genangan itu.

"Dulu air yang selama ini menggenang itu ada di tanah Daun Village sebelum diuruk, saat tanah ini sudah mulai difungsikan. Maka kondisi air itu berpindah dan menggenang di area terendah GPA," ujarnya.

Maka, dalam waktu dekat ia mengupayakan untuk mempertemukan kedua belah pengembang untuk mencari win-win solusinya.

"Yang penting hasilnya jangan justru memindah

masalah, kami minta kedua belah pihak saling membenahi," jelasnya.

Terkait pertemuan untuk kedua belah pihak sejatinya sudah beberapa kali dilakukan dan kesepakatan juga terjadi, namun tak ada jua hasilnya.

Disinggung izin pengerukan pengembang, Zulkifli mengaku jika sejauh ini pihaknya belum menemukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nya.

"Tapi tidak usah dulu berfikir jauh ke sana, yang penting warga ini sudah bebas dari banjir itu yang utama," tutupnya.

Usai mendengar penjelasan Zulkifli, massa pun perlahan membubarkan diri. Namun, jika Pemkot tidak ada upaya membantu warga, maka warga akan kembali menggelar demo lagi.

Diketahui, warga RT 52 dan RT 42 menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Wali Kota Balikpapan, Kamis (21/9/2023). Mereka menagih janji Wali Kota Balikpapan untuk menindak tegas pengembang yang diduga menjadi penyebab banjir di Perumahan Griya Permata Asri (GPA), Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan sejak Juni 2023 lalu.

Akibat banjir tersebut, aktivitas warga sekitar seperti lumpuh total, bahkan hingga menimbulkan beragam penyakit.

Dalam aksi demo tersebut, warga sempat melakukan aksi bakar ban, untuk memanggil perwakilan dari Pemkot Balikpapan, yaitu Asisten 1 Pemerintahan, Zulkifli yang akhirnya bersedia menemui peserta aksi selaku mewakili pihak Pemkot Balikpapan

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



PASER SEGERA GAUNGKAN PORPROV KALTIM 2026



**UPTD TERMINAL KUARO LAKUKAN
INOVASI TERHADAP LAPORAN
RETRIBUSI DAN PENERIMAAN**



Pertemuan persiapan pencahangan Porprov Kaltim

PASER SEGERA GAUNGKAN PORPROV KALTIM 2026

PASER - Berbagai upaya dalam rangka menyukseskan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke VIII Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2026 mendatang, Bupati Paser, Fahmi Fadli, terus mengupayakan agar persiapan pelaksanaan berjalan dengan baik.

Salah satunya, dengan menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser bersama Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Paser, untuk memenuhi kelengkapan yang diperlukan.

"Kabupaten Paser harus sukses menja-di tuan rumah dan memperoleh beragam prestasi pada cabor yang akan dipertandingkan saat Porprov Kaltim," kata Fahmi, Kamis (21/9/2023).

Sebagai tuan rumah, Kabupaten Paser tengah melakukan berbagai pembangunan dan pembenahan sarana prasarana dalam menunjang kelangsungan ajang

olahraga tingkat provinsi itu. Seperti venue untuk cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan.

"Seperti pembangunan sarana olahraga, utamakan yang memang sarannya masih belum layak dan cabor itu dipertandingkan di Porprov. Sehingga saat pelaksanaan, kita tidak terlihat asal-asalan," imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Paser telah mengumpulkan pihak terkait guna memperoleh informasi mengenai kendala yang dihadapi dalam persiapan Porprov Kaltim ke depan sekaligus membicarakan solusi dari masalah itu.

"Pencanangan Porprov Kaltim ini akan dilaksanakan di Paser pada 24 September mendatang, dan akan diisi dengan berbagai kegiatan seperti jalan sehat, disusul jalan santai, dan dilanjutkan dengan pencahangan secara seremonial," ujarnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

Laporan retribusi dan penerimaan UPTD Terminal Kuaro kini berbasis digital



UPTD TERMINAL KUARO LAKUKAN INOVASI TERHADAP LAPORAN RETRIBUSI DAN PENERIMAAN

PASER - Layanan transportasi darat di Kabupaten Paser yakni Terminal tipe C Kuaro di Kecamatan Kuaro, melakukan terobosan perubahan bmdengan membuat Sistem Laporan Retribusi atau Silapri.

Terminal yang menjadi persinggahan yang melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan itu, membuat Silapri sebagai optimalisasi terhadap laporan retribusi dan penerimaan pajak.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Kuaro, Said Zulkifly Yusuf menjelaskan, tugas terminal yang berada di bawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Paser ini cukup banyak.

Di antaranya, mengendalikan dan mengawasi jalur angkutan lintas desa dan lintas provinsi (transit). Dalam operasionalnya memiliki banyak tugas, terutama dalam menarik retribusi angkutan, kios, dan parkir.

Di mana tugas ini hanya diemban dengan dua petugas. Kifly sendiri yang merupakan Kepala UPTD dan satu orang petugas non PNS atau Pegawai Tidak Tetap (PTT). "Sementara terminal harus beroperasi 24 jam, pembebanan tugas sudah over luar biasa," kata Kifly sa-paan akrabnya.

Dibuatnya Silapri, dijelaskan Kifly, guna memudahkan petugas dalam sistem pelaporan yang dilakukan juru pungut, bendahara penerima, dan atasan langsung ke Dishub

Kabupaten Paser. Sistem ini membantu memenuhi peningkatan target kinerja.

Adapun target kinerja itu berupa pelaksanaan pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan retribusi di lingkungan UPTD Terminal Kuaro. Mulai dari data angkutan yang keluar masuk, setoran dari kios yang berjualan, dan jasa parkir.

"Aplikasi ini ada Barcode. Nantinya masyarakat bisa mengetahui jumlah pendapatan retribusi Terminal Kuaro secara transparan," jelasnya.

Terpisah Kepala Dishub Kabupaten Paser, Inayatullah, mengapresiasi program aksi perubahan yang dibuat oleh UPTD Terminal Kuaro. Selama ini laporan yang diterimanya masih bersifat manual atau fisik.

Dengan adanya inovasi tersebut dan berbasis digital, akan memudahkan Dishub Kabupaten Paser dalam pengawasan dan pelaporan. "Apalagi terminal Kuaro ini sangat besar perannya dalam mengawasi arus transportasi jalur trans Kaltim-Kalsel," kata Inayatullah.

Era digital saat ini, menurut Inayatullah sangat diperlukan inovasi pelayanan dan pelaporan yang berbasis digital. Selain memudahkan pimpinan, ini juga bisa menunjukkan ke masyarakat kinerja UPTD Terminal Kuaro.

"Resiko ini yang jadi tantangan dan harus diselesaikan oleh Kepala UPTD melalui program aksi perubahannya," kata Inayatullah.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Ketua BNK Paser saata di BNN RI bersama Kepala BNNP Kaltim

BNK PASER JEMPUT BOLA KE BNN RI, TINGKATKAN STATUS MENJADI BNNK

PASER - Sederet kasus penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat berbahaya di Kabupaten Paser perlu jadi catatan khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dalam upaya pemberantasannya.

Menjawab hal itu, Wakil Bupati Paser, sekaligus Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Paser, Syarifah Masitah Assegaf, berupaya jemput bola ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia (RI) untuk mensekusi masalah ini.

"Sehingga kami menilai perlu untuk menyampaikan masalah ini ke BNN RI agar perlu menyikapi masalah-masalah ini," kata Masitah, Kamis (21/9/2023).

Kunjungan yang dilangsungkan pada Rabu (20/9/2023) itu, bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur (Kaltim), Brigjen Pol Edhy Moestofa dan jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Paser.

Masitah menyebut, salah satu upaya mengatasi masalah tersebut, yakni meningkatkan status BNK menjadi BNNK. Dengan adanya peningkatan lembaga non struktural yang berkedudu-

kan di bawah dan bertanggung jawab Bupati itu, maka penindakan secara masif dapat dilakukan.

"Vertikalisasi ini sangat penting dan sangat kami harapkan mengingat peredaran narkoba di Kabupaten Paser sudah di tahap memprihatinkan," ujar Masitah.

Berdasarkan data yang dimiliki, Kabupaten Paser berada di urutan ke empat kasus peredaran narkoba di Provinsi Kaltim. Sementara di Kabupaten Paser sendiri, dari total 10 Kecamatan, kasus peredaran narkoba terjadi di semua wilayah.

Masitah mengaku, hal ini cukup memprihatinkan. Apalagi dari pengungkapan kasus yang dilakukan oleh jajaran Satresnarkoba Polres Paser, hampir dalam sepekan adanya penahanan terhadap pelaku baik pengguna, pengedar maupun bandar di Kabupaten Paser.

"Baru-baru ini hasil peninjauan ke Rutan juga begitu. Dari 7 bilik pria dan 1 bilik wanita, semua terjerat karena kasus narkoba," ungkap Masitah.

Masitah berharap, dari upayanya itu, BNN RI dapat merealisasikan usulan pihaknya yakni

meningkatkan status BNK menjadi BNNK, agar dalam pemberantasan peredaran narkoba di Kabupaten Paser dapat pihaknya laksanakan dengan baik.

"Apabila sudah menjadi BNNK, kewenangan kami ditingkatkan dan saat itu pun kami mampu melakukan upaya-upaya penindakan langsung kepada penyalahgunaan narkoba," ujarnya.

Masitah menambahkan bahwa vertikalisasi BNK ke BNNK masuk dalam skala prioritas dari BNN RI. Mengingat, Kabupaten Paser merupakan daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Selain sebagai penyangga IKN Nusantara, Kabupaten Paser merupakan daerah rawan masuknya narkoba mengingat sebagai wilayah ujung selatan Provinsi Kaltim dan pintu masuk Provinsi Kaltim dari Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

"BNN RI yang diwakilkan Kepala Biro Perencanaan termasuk Kepala SDM, sangat menanggapi positif. Mereka berupaya untuk memprioritaskan BNK Paser menjadi BNNK kedepannya," tutup Masitah.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI JUMAT
22 SEP 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



JOKOWI: HARGA KEBUTUHAN POKOK DI PASAR MERDEKA TERKENDALI

**MUDA
BERAHLAK
AMANAH
DINAMIS**

A portrait of Arie Wibowo, a man wearing a yellow blazer and a black peci, smiling.

**ARIE
WIBOWO**

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG

ARIE
WIBOWO



Presiden Joko Widodo meninjau pasokan dan harga kebutuhan pokok di Pasar Merdeka, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (21/9/2023). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

JOKOWI: HARGA KEBUTUHAN POKOK DI PASAR MERDEKA TERKENDALI

SAMARINDA - Presiden Joko Widodo mengatakan harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Merdeka, Samarinda, Kalimantan Timur, masih terkendali dengan baik.

"Saya melihat, saya senang harga-harga terkendali baik," kata Presiden dalam keterangannya usai peninjauan Pasar Merdeka, di Kalimantan Timur, Kamis (21/9/2023).

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa sejumlah komoditas pokok di sana mengalami penurunan harga, di antaranya adalah cabai dan juga bawang.

"Bahkan cabai harganya juga turun, kemudian bawang putih harganya juga turun, bawang merah harganya juga turun," tuturnya.

Namun, harga beras yang ada di pasar tersebut masih tergolong tinggi dan belum mengalami penurunan. Akan tetapi, Presiden menyebut saat ini beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga

Pangan) dari Bulog telah mulai disalurkan ke pasar tersebut.

"Kita harapkan dengan operasi pasar yang dilakukan Bulog, harga juga bisa turun. Beras ya," harapnya.

Kepala Negara juga menuturkan bahwa kenaikan harga tersebut di antaranya diakibatkan oleh fenomena super El Nino yang terjadi di tujuh provinsi dan mengakibatkan pasokan beras dari petani berkurang.

Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah menambah cadangan beras melalui impor.

"Ya kita memperbesar cadangan strategis lewat impor karena untuk menutup kekurangan produksi yang ada," ujarnya.

Salah satu pedagang beras bernama Niko menyebut bahwa saat ini beras premium memang mengalami kenaikan. Akan tetapi, dia menilai adanya bantuan beras SPHP dari Bulog cukup memban-

tu untuk menurunkan harga.

"Kalau untuk beras premium lagi ada kenaikan, tapi sekarang kita dibantu sama Bulog beras SPHP, jadi harga mulai meredam, mulai turun sekarang," jelas Niko.

Niko pun berharap agar ke depannya harga beras bisa turun dan kembali normal.

Adapun berdasarkan foto-foto yang diterima di Jakarta, selain meninjau kebutuhan pokok, Presiden juga tampak menyapa dan berdialog dengan para pedagang serta memberikan bantuan uang tunai.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungannya di Pasar Merdeka yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun. (Ant/MK)

**Pewarta : Rangga Pandu
Asmara Jingga
Editor : Budi Suyanto**



Rangkaian
Kerjasama
Media Kaltim
Grup dan
Bawaslu
Kaltim .

BAWASLU DAN MEDIA KALTIM GROUP BERSINERGI PERKUAT DAN MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU

SAMARINDA – Sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Media Kaltim Group dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) pada 15 Agustus 2023 lalu, kini kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama terkait publikasi kepemiluan. Utamanya, untuk memperkuat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu 2024.

Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kaltim Hari Derwanto dan CEO Media Kaltim Grup, Agus Susanto di Kantor Bawaslu Kaltim, pada Kamis (21/9/2023).

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut disaksikan oleh Ketua Bawaslu Bontang Aldy Artian, Koordinator Divisi Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kaltim, Goleh Akbar Tanjung

Komisioner Bawaslu Kabupaten Edwin, Ahmadi dan Afifah. Sedangkan saksi dari Media Kaltim Group yakni Direktur Radar Media Adhi Abdhian dan Jurnalis Media Kaltim Hanafi.

Dalam kesempatan tersebut Goleh turut mengucapkan terima kasih kepada Media Kaltim Group dengan adanya kerja sama yang telah dibuat.

“Alhamdulillah kita sudah mem-

buat MoU, artinya kita sama-sama memiliki peran dan kerjasama dalam pencegahan kecurangan pemilu, karena kita akan bekerja dengan banyak pihak,” ucap Goleh.

Dia juga menyebutkan pentingnya kerjasama antara Bawaslu dengan media untuk mencerdaskan masyarakat terkait pemilu.

“Media Kaltim adalah rekan dari Bawaslu yang bisa mengedukasi masyarakat Kaltim seperti larangan terkait pemilu dan netralitasnya ASN, serta sosialisasi terkait tahapan-tahapan pemilu,” ujarnya.

Goleh berharap dalam pemilu ke depan, masyarakat tidak lagi dijadikan sebagai obyek yang dimanfaatkan suaranya tapi lebih kepada subyek yang independen dalam memilih.

“Saya berharap masyarakat mampu menjadi subyek dan bukan obyek lagi. Saya rasa Media adalah yang bisa menjembatani terkait isu-isu kepemiluan agar tetap konsisten,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Kaltim Hari Derwanto dalam sambutannya juga berharap pada perjanjian kerjasama ini akan memberikan kualitas dalam menyiarkan pikiran penyelenggara pemilu dengan media yang juga bisa menyiarkan lebih luas kepada masyarakat.

“Semoga dari kerjasama ini bisa membuat kualitas dalam meny-

iarkan pikiran, kita lebih dan lebih membumi apalagi Media Kaltim Group punya beberapa anak perusahaan. Kita dimungkinkan untuk membawa pihak lain untuk kerjasama ini dalam penyiaran segala kegiatan Bawaslu,” Ungkapnya.

“Semoga kerjasama ini bisa menjadi pemantik semua pihak untuk bekerjasama dengan semua mengatensi menjadi suatu gerakan pengawasan semesta kerjasama seluruh elemen termasuk diaspora Bawaslu sendiri. Apalagi Kaltim masuk IPK 5 besar daerah rawan pemilu,” tambahnya.

Sementara itu, CEO Media Kaltim Group, Agus Susanto, juga menyambut baik adanya kerjasama ini dan berkomitmen akan mengerahkan 7 media yang ada di Media Kaltim Group.

“Kita memiliki 7 media, kita akan kerahkan dalam pemberitaan dengan jaringan kita yang tersebar di seluruh Kaltim,” ujar yang juga mantan anggota Bawaslu Bontang ini.

Setelah memberikan sambutan masing-masing pihak media Kaltim Grup dan Bawaslu Kaltim kemudian melakukan penandatanganan kesepakatan dan pihak Media Kaltim Group memberikan souvenir baju HUT Media Kaltim ke-3 tahun.

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari